

ABSTRAK

KEDUDUKAN KOMISARIS INDEPENDEN PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN UNTUK MENCIPTAKAN KONDISI BANK YANG SEHAT

Sebagaimana diketahui bahwa sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 di beberapa negara, telah berdampak buruk pada perekonomian nasional Krisis perbankan nasional juga ditandai dengan turunnya kepercayaan antar bank nasional sehingga bank mengalami kerugian operasional dan adanya campur tangan (intervensi) yang tidak sehat dari Pengurus Bank, dalam hal ini Direktur Utama dan Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk Mengetahui status kedudukan Dewan Komisaris di dalam PT. Bank Pembangunan Daerah. Untuk Mengetahui fungsi pengawasannya secara efektif tanpa campur tangan siapapun di PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku untuk menciptakan kondisi bank yang sehat. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode empiris normatif terdiri atas penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektivitas hukum, Studi dokumen dilakukan pada perpustakaan dan wawancara di Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dewan Komisaris memiliki kedudukan yang sangat penting untuk melindungi kepentingan pemilik. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Dewan Komisaris ikut menetapkan arah tujuan dan memformulasikan kebijakan, melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan usaha bank secara keseluruhan termasuk menyetujui anggaran dan mengawasi pelaksanaannya, dan melakukan langkah-langkah agar bank tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. pelaksanaan pengawasan Komisaris Independen pada Bank Pembangunan Daerah Maluku belum berjalan secara optimal hal dikarenakan Belum dapat dipisahkan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi manajemen bank. Oleh karena itu Perlu dibuatkan suatu ketentuan yang secara tegas melarang pemegang saham bank agar terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan operasional perbankan, hal demikian penting agar terciptanya kondisi tata kelola perbankan yang sehat. perlu dibuatkan suatu payung hukum atau ketentuan oleh regulator perbankan yang melarang pemegang saham memberhentikan Komisaris Independen, sebelum lebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak OJK untuk membuktikan apakah terdapat kesalahan yang telah dilakukan Komisaris Independen dimaksud atau tidak.

Kata kunci : Dewan Komisaris, Pengawasan, Manajemen

Abstract

Independent Commissioner Position of PT. Bank Pembangunan Daerah in Order to Apply a Function of Supervision to Create a Healthy Bank Condition

As we know since the monetary crisis in 1997 in some countries, has caused negative impact on national economy. The national banking crisis was also marked by a decrease of a trust between national bank, which result in its operational loss and unhealthy intervention from the bank management, in this matter are President Director and Governor as the head of state government. This research was meant to get to know a status of board of commissioners position in PT. Bank Pembangunan Daerah, to know its supervision function effectively without any intervention in PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku in order to achieve a healthy bank condition. Board of Commissioner has a very important role to protect interests of the owners. Why this is happened, because there is no separation yet between ownership function and bank management function. Therefore, an assertive provision need to be made to bank stakeholder to be involved directly / not directly in banking operational activity. Also a law and regulation to ban stakeholder to dismiss independent Commissioner need to be made by banking regulator, prior to this action, it must have written agreement from OJK to prove if there is an error made by the independent Commissioner or not.

Keyword : Board of Commissioner, Supervision, Management